

## BAB VII

### KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pacitan **“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”**.

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2016-2021 terdapat beberapa kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program-program pembangunan yang lain.

Kebijakan dan program unggulan yang dimaksud, yaitu:

#### **MISI 1: MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN AKUNTABEL**

1. Birokrasi Profesional dan Berkarakter, melalui Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melalui Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
3. Predator (Petugas Registrasi Armada Sepeda Motor) dan Silades (Sidang Langsung di Desa), melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan.
4. Pelayanan Publik Prima Berbasis IT (Pacitan e-gov), melalui Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika.
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
6. Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, melalui Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
7. Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana, melalui Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

**MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT**

1. Padu PAUD (Pacitan Peduli PAUD), melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pacitan Cendekia, melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
3. Guru CAKEP (Cakap, Kompetitif, Edukatif Dan Profesional), melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pembinaan Olah Raga dan Kepemudaan, melalui :
  - a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga
  - b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pacitan (JPKP), melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
6. Kampung ASI, melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
7. GARSIA (Gerakan Selamatkan Ibu dan Anak), melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
8. SANTUN MAPAN (Sanitasi Total Untuk Masyarakat Pacitan), melalui Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
9. Ketahanan Keluarga Berbasis Posdaya, melalui Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Secara Mandiri.
10. GRINDULU MAPAN (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan), melalui program-program pembangunan yang mendukung penanggulangan kemiskinan.
11. Peningkatan Rehabilitasi Sosial, melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**MISI 3: MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN MENGGERAKKAN POTENSI DAERAH DIDUKUNG KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI**

1. Rumah Pangan Lestari, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Pacitan Bebas Rawan Pangan, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Pertanian Untuk Kini dan Nanti, melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian.
4. Bangga Beternak, melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
5. Sejahtera Bersama Usaha Mikro dan Koperasi, melalui Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
6. Revitalisasi Pasar Daerah/Tradisional, melalui Program Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa.
7. Industri berdaya saing, melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
8. Ayo Wisata Ke Pacitan, melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
9. Transportasi MAPAN (Mantap, Aman dan Nyaman), melalui Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
10. Pengelolaan Sumber Daya Air Berdaya Guna, melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.
11. Pacitan Bebas Kawasan Kumuh, melalui Program Pengembangan Perumahan.

12. Air Bersih untuk rakyat, melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Air Minum.
13. Pacitan BERSERI (Bersih, Sehat dan Lestari), melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

#### **MISI 4: MENINGKATKAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONISASI ANTAR SELURUH LAPISAN MASYARAKAT**

1. Pacitan Rukun Damai (pemantapan kualitas beragama dan kerukunan hidup beragama), melalui Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.
2. Pacitan Adem Ayem (peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat), melalui Program Pemeliharaan Ketrentaman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal.
3. Pacitan Berubah (revolusi mental dan penguatan jati diri masyarakat berbasis kearifan lokal), penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia, pelestarian seni budaya tradisional dan jati diri masyarakat pacitan, melalui Program Pengembangan Nilai Budaya.

Selain kebijakan dan program unggulan sebagaimana diuraikan di atas, maka secara keseluruhan kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada Tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik secara profesional	Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT	Persentase Cakupan Penerbitan (%) :			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				1. KTP	91,38	94,6			
				2. Kartu Keluarga	95,7	97,75			
				3. Akta Kelahiran	81,43	86,35			
				4. Akta Kematian	54,69	56,4	Program pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informatika	Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	2,22	100			
				Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi	25	100			
				Persentase PD yang menerapkan SOP	100	100	Program penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100	100	Program Penyelenggaraan Persandian Daerah	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Semua PD
				Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Semua PD
				Tingkat disiplin aparatur	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Semua PD
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Semua PD Kecamatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100	dan Pelayanan Publik Kecamatan	Daerah	
			Peningkatan kapasitas aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat	18,56	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
				Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur	8,79	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
				Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	19,46	100		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional	Jumlah dokumen data/informasi/statistik daerah yang dihasilkan	3	7	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah arsip in aktif yang dikelola	4.320 Box	5.625 Box	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Kearsipan	Dinas Perpustakaan
				Jumlah arsip statis yang dipelihara	97 Box	227 Box			
				Persentase PD dan desa yang menerapkan arsip secara baku (%)	65,89	93,46	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	Dinas Perpustakaan
				Jumlah Pengunjung Perpustakaan	59.040	137.389	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
			Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i>	Jumlah informasi publik yang terpublikasi	210	630	Program Penyebarluasan Informasi Publik dan kerjasama media massa	Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	12	72			
			Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif	Cakupan desa dan kelurahan tangguh bencana (%)	2,3	16,4	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	BPBD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota	0,001	0,001	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	SATPOL PP
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	< 90 hari	<90 hari	Program pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH bidang pemerintahan umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa	10,53	100			
				Keterpaduan program pemerintah	140 kali	250 kali	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH / Wakil KDH	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	100	100	Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani	40	100	Program peningkatan kerjasama daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase tertib administrasi pembangunan	100	100	Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui ULP	40	100			
				Persentase kebijakan bidang perekonomian yang diterbitkan	18,92	100	Program koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bidang perekonomian	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan bidang sumber daya alam yang diterbitkan	14,29	100			
				Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan	14,29	100	Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	45,57	100	Program penataan peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase penyampaian informasi tentang cukai kepada masyarakat dan/ pemangku kepentingan	100	100	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
			Penataan organisasi/kelembagaan	Persentase kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi	100	100	Program peningkatan Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase raperda yang ditetapkan bersama (%)	58,62	100	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu	Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD	100	100	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda
				Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	35,56	100	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda
				Persentase dokumen dan data perencanaan bidang perekonomian yang dihasilkan	38,98	100	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda
				Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan	26,67	100	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda
				Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	50,7	100	Program Perencanaan wilayah dan SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan, Pengoperasian Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Yang Dimanfaatkan	95	96	Program Kelitbangan / Inovasi Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	WTP	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100			
				Cakupan pendapatan daerah	1,3	1,8	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	36,63	41,24	Program peningkatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	CC	> B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua PD
				Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan :			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
				Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT (%)	100	100			
				Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (%)	90,16	92,5			
				Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan	42,5	55	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun (%)	87,5	100	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
				Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (%)	100	100	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
			Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi baik (%)	78,91	88,55	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau	Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau	APK PAUD	75,81	86,68	Program Pendidikan anak usia dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) :			Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				SD/MI	99,03	99,2			
				SMP/MTs	85,14	85,3			
				Angka kelulusan (%) :					
				SD/MI	100	100			
				SMP/MTs	100	100			
				Angka Partisipasi Kasar (APK):					
				SD/MI/Paket A	103,12	103,18			
				SMP/MTs/Paket B	98,62	99,1			
				Angka rata-rata lama sekolah	7,27	7,5			
				Angka Melek Huruf (AHM) pada usia 15 s/d 59 th	92,83	95,33	Program pendidikan non formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan	Persentase guru yang berkualifikasi minimal S1			Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				SD/MI	87,78	90			
				SMP/MTs	95,51	96,75			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Nilai indeks kepuasan masyarakat bidang pendidikan	80.90	81.50	Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga	156	203	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi (%)	60	65	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Cakupan gedung puskesmas/pustu dalam kondisi baik	37,18	89,74	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Sarana dan prasarana rumah sakit yang representatif :			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah Sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD
				Persentase ruang rawat inap rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik	69,57	74,2			
				Persentase kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (kondisi baik)	85,97	86,67			
				Persentase jumlah ambulance/mobil jenazah yang berfungsi dengan baik	77,78	83,3			
				Persentase penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat	71,88	76,12	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Kesehatan	RSUD
				Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan (%)	95	98	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Peningkatan akses kesehatan masyarakat	Kunjungan puskesmas / visit rate (%)	85,75	88,75	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				% Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	10,44	11,36			RSUD
				Persentase karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun	44,42	47,46	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	RSUD
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Cakupan Sarana Kesehatan Berstandar	0	100	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cost Recovery Rate	>40	>40	Program peningkatan mutu Pelayanan BLUD	Kesehatan	RSUD
			Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS	Cakupan rumah sehat	73,11	79	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan desa siaga aktif berstrata Purnama Mandiri	8,77	23,39	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar	Persentase penanganan penyakit menular (Diare, DBD, Tb Paru dan pneumonia balita)	100	100	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan balita gizi buruk	100	100	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan pertolongan persalinan di sarana kesehatan	99,83	99,89	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan anak balita paripurna (%)	86,6	89			
				Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	55,11	65	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana	Persentase sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja	35	39	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
			Persentase sekolah dan pondok pesantren yang telah membentuk PIK-R	5	35	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
			Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB mandiri	73,9	79	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
			Cakupan kelompok BKB Holistik Integratif ber KB	24,9	80,5	Program Pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
5	Menurunnya angka kemiskinan	Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu	Cakupan jumlah kader dalam kelompok Tribina	41,09	70,7	Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
			Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang mendapat bantuan modal	1,43	1,48	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	Koperasi, Usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah layak huni	92,21	92,55	Program lingkungan sehat perumahan	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM/LPMD)	6,06	6,22	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase pertumbuhan lembaga ekonomi perdesaan (%)	2,17	2,95	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	26,99	27,39	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Pengendalian jumlah penduduk	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) %	9,98	6	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	2,68	12,5	Program Pelayanan Kontrasepsi	Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Persentase transmigran yang ditempatkan	100	100	Program fasilitasi transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6	Menurunnya pengangguran	Memperluas kesempatan kerja dan usaha	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga	Persentase angkatan kerja perempuan	79,2	80,8	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
			Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru	3,07	3,97	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Koperasi, Usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	75	81	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase Pembinaan Tenaga Kerja	100	100	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan (%)	78,3	84,5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinas Sosial
				Persentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat (%)	60	66	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
				Persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina (%)	80	88	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)	Sosial	Dinas Sosial
				Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan (%)	65	73,1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
			Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase advokasi dan fasilitasi PUG dan anak (%)	36,96	50	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	100	100	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Persentase rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	87,07	87,28	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Menguatnya kondisi perekonomian daerah	Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah	Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif	Nilai Realisasi Investasi (trilyun)	0,693	0,949	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	26,84	7,5			
				Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100	100	Program Peningkatan, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Lama proses izin usaha Penanaman Modal (hari)	5	3			
				Jumlah Perda dan Perbup dan kebijakan lain yang mendukung iklim investasi	4	6			
				Persentase permohonan izin energi dan sumber daya mineral yang dilayani	100	100	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Peningkatan pengendalian harga bahan pokok	Persentase komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya	100	100	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung produksi dan distribusi perekonomian di daerah	Persentase rata-rata pasar daerah dalam kondisi baik	80,25	87	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Omset penjualan komoditas unggulan	711 M	921 M	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	12,5	18,75	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	0,21	0,1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro dan koperasi	Meningkatkan peran UM dan koperasi dalam aktifitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah	Penguatan dan pemberdayaan UM dan koperasi	Persentase Koperasi Mandiri	0,81	2,42	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi, Usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Pengembangan sistem kemitraan UM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah	Persentase Usaha Mikro yang dibina	3,47	3,52	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif	Koperasi, Usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
10	Meningkatnya kinerja sektor industri	Meningkatkan pengembangan sektor industri untuk mendukung sektor unggulan daerah	Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil menengah dan kerajinan	11.347	12.697	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	3,95	4,71	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah yang terintegrasi dan berdaya saing	Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan	Persentase pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Pacitan	25	63	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Persentase museum Geosite yang dikembangkan (%)	42	75	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan
				Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Pacitan yang difasilitasi (%)	69	80	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan
			Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	33	67	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
12	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Meningkatkan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian	Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan	Indeks Pertanaman Padi (IP)	1,75	1,77	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%)	7,56	54,40			
				Peningkatan kelas kelompok tani (%)	2,62	3,26			
				Cakupan kelompok tani yang dilatih teknologi perkebunan	0	0,25			
				Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	10.891,42	12.626,14	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Produksi perikanan budidaya (kolam, keramba, minapadi, tambak) (ton)	801.448	1.290.740	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	1.398,28	1.784,60	Program Optimalisasi pengelolaan produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Diseminasi teknologi peternakan pada peternak (%)	0,84	3,24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian
		Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor pertanian		Persentase pelaku usaha perkebun yang mendapat pembinaan	0	25	Program Peningkatan Kapasitas Pelaku usaha Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Cakupan masyarakat perikanan yang mandiri (orang)	4.514	5.761	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau	6,80	5	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Pertanian	Dinas Pertanian
				Status kesehatan ternak (%)	87,5	89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	Dinas Pertanian
				Produksi daging (kg)	3.247.446	3.599.625	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Produksi telur (kg)	498.000	552.004			
				Produksi Susu (lt)	21.600	23.942			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Populasi ternak potong besar (ekor)	85.399	94.660			
				Populasi ternak potong kecil (ekor)	171.213	189.780			
				Populasi unggas (ekor)	1.111.778	1.232.341			
13	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Pacitan bebas rawan pangan	Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan pangan (ton) :			Program peningkatan ketahanan pangan	Pangan	Dinas Pangan
				- Beras	116.117	122.000			
				- Jagung	102.256	107.470			
				- Kedelai	6.026	6.333			
				- Daging	1.736	1.917			
				- Telur	373	392			
				- Ikan	8.521	8.956			
				Cadangan pangan pemerintah kabupaten (ton)	≥ 100 ton	≥ 100 ton			
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,84	86,8			
				Pangan yang aman	89	89,9			
			Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan	Produksi hasil perkebunan (ton/Ha)	37.482	38.232	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
				Produktifitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (kw/h)	54,57	55			
				Produktifitas tanaman pangan per ha padi dan palawija (kw/h)	90,61	91,09			
				Produksi tanaman pangan padi dan palawija (ton)	885.114	889.804			
				Produksi hortikultura (ton)	65.836	100.663			
14	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang	Peningkatan kualitas dan kuantitas	Persentase jalan dan jembatan yang dibangun			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	menjangkau seluruh wilayah	memadai	infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan)	- Jalan	39,8	100			Ruang
				- Jembatan	42,8	95,83			
				Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik			Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				- Jalan	56,15	65,93			
				- Jembatan	92,81	93,63	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					
				- Alat berat	68,57	71,19			
				- Alat laboratorium	93,55	96,91			
				Persentase jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				- Jalan	24,75	36,21			
				- Jembatan	50,1	59,7			
				Persentase permukiman kumuh	0,057	0	Program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Peningkatan pembangunan jalan lingkungan	55,38	67,88			
				Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	41,520	52,05			
				Persentase peningkatan prasarana permukiman	0	10,50	Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Sarana Prasarana Permukiman	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	33,94	83,37	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	31,71	71,74	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji)	39,44	39,65	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	36,77	60,66	Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas	64,64	95,15	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum	Persentase Penduduk berakses air bersih	50,05	60,75	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi	Persentase rumah tangga ber-Sanitasi	87,56	95,06			
				Drainase dalam kondisi baik	80,54	88,04	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase luas sawah beririgasi dalam kondisi baik	44,30	60,80	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	39,30	46,00			
				Luas sawah baru beririgasi (Ha)	0	800			
				Jumlah embung dalam kondisi baik	11	21	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah	Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan	4	12	Program perencanaan tata ruang	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase bangunan ber IMB per total bangunan	71,72	84,22	Program pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	181	290	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah penataan kawasan dan penanda kawasan	7	12	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung	Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase pengolahan sampah akhir	27	30	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penanganan sampah	90,35	97,85			
				Penghargaan Kebersihan Nasional	ada	ada			
				Jumlah sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	41	563			
				Penumbuhan bank sampah	13	80			
				Persentase industri hasil tembakau yang teruji kualitas lingkungan hidupnya	50	100	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah Taman Kehati	0	5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase taman kota yang tertata	36,9	60,2			
				Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan yang disampling	156	200	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100			

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Indeks Tutupan Hutan (ITH)	72,27	72,42	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
16	Meningkatnya kerukunan, kemandirian, dan ketertiban masyarakat (Pacitan Adem Ayem)	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Pacitan Adem Ayem)	Peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama.	Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan	0	0	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SETDA
			Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia	Persentase petugas LINMAS terlatih (%)	27	100	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP
				Persentase jumlah pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERKADA (%)	90	97	Program Pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP
				Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam (kali)	2	2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	SATPOL PP
				Persentase penduduk yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	1,95	13,63	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol
				Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	100	100	Program pendidikan politik masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol
			Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Pacitan	Persentase seniman/ budayawan yang di bina (%)	85	100	Program pengembangan nilai budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan